



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 19 TAHUN 2013**

TENTANG

**TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UPT PBB DAN BPHTB PADA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu perlu menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UPT PBB DAN BPHTB PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang membawahi Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
7. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut UPT PBB dan BPHTB adalah UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala UPT PBB dan BPHTB adalah Kepala UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian UPT PBB dan BPHTB adalah Kepala Sub Bagian UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPT PBB dan BPHTB adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UPT PBB DAN BPHTB

Bagian Kesatu UPT PBB dan BPHTB

Pasal 2

- (1) UPT PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dalam hal pendataan, pelayanan dan penagihan PBB sektor perkotaan dan perdesaan dan BPHTB.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT PBB dan BPHTB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB sektor perkotaan dan perdesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - b. mendata, menilai dan menetapkan PBB sektor perkotaan dan perdesaan;
 - c. mengolah data dan informasi PBB sektor perkotaan dan perdesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - d. melaksanakan pelayanan PBB sektor perkotaan dan perdesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - e. melaksanakan penagihan PBB sektor perkotaan dan perdesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB sektor perkotaan dan perdesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - h. menyiapkan SDM, sarana dan prasarana kegiatan UPT;
 - i. menyiapkan perangkat aturan, terkait dengan penyerahan PBB sektor perkotaan dan perdesaan ke daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha UPT PBB dan BPHTB

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT PBB dan BPHTB mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan UPT PBB dan BPHTB.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menyusun bahan program kerja serta memberikan pelayanan Administrasi dilingkungan UPT PBB dan BPHTB;
- b. menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPT PBB dan BPHTB;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;
- d. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
- e. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada UPT PBB dan BPHTB melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPT PBB dan BPHTB.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT PBB dan BPHTB sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT UPT PBB dan BPHTB berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT PBB dan BPHTB.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungsn UPT PBB dan BPHTB wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT PBB dan BPHTB bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan UPT PBB dan BPHTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 7

Dalam hal kepala UPT PBB dan BPHTB berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berkaitan dengan masalah teknis operasional, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan/Kepala UPT PBB dan BPHTB.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

GUSTI HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013 NOMOR 165